

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya pengelolaan administrasi keuangan daerah di Indonesia menunjukkan keberagaman. Dalam pengelolaan keuangan saat ini banyak instansi pemerintah maupun swasta mulai memanfaatkan sistem informasi yang dikemas dalam aplikasi. Mayoritas sistem pelaporan keuangan saat ini menggunakan perangkat lunak yang menyimpan semua penggunaan keuangan dan data pelaporan akuntabilitas, yang bertentangan dengan metode manual atau tradisional yang digunakan di masa lalu.

Keberadaan sistem informasi kerap kali mampu memberikan dampak yang baik bagi peningkatan kinerja instansi pemerintah dan menciptakan lingkungan kerja yang tinggi akan efektivitas dan produktivitas, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk bisa memanfaatkan dan mengembangkan sistem informasi yang diperuntukan bagi keperluan pembangunan dan pengembangan daerah atau kabupaten/kota berupa sistem informasi yang memiliki kapasitas penunjang perencanaan dan pembangunan daerah atau kabupaten/kota. Sistem informasi akuntansi telah berkembang pesat seiring dengan teknologi informasi dan telah terbukti penting untuk kegiatan ekonomi dan tujuan pembangunan.

Pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan yang berkualitas baik, karena banyak pihak yang mengandalkan dan membutuhkan informasi. Laporan keuangan yang dirilis oleh pemerintah daerah dengan agenda yang

bervariasi. Masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga audit, orang-orang yang terlibat dalam proses investasi, donor, pinjaman, dan pemerintah sendiri termasuk pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan harus memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 agar dapat dianggap relevan, dapat diandalkan, sebanding, dan dapat dipahami.

Sistem pengendalian internal diterapkan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah, dan mereka terorganisir dengan baik di dalam keduanya. Untuk mampu mengakses, mengelola, dan menggunakan informasi dengan cepat, akurat, dan efisien, instansi milik negara harus memiliki teknologi informasi yang baik. Ini dikenal sebagai sistem pemerintahan yang baik. Untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam mengelola uang dan menyebarkan informasi keuangan kepada pemerintah nasional dan pemangku kepentingan daerah, pemerintah tertarik untuk memanfaatkan kemajuan teknologi.

Saat ini kebutuhan akan teknologi yang dapat menyampaikan informasi yang tepat dan relevan sangatlah penting. Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah berhasil berdampak pada sistem informasi akuntansi di instansi pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pengelolaan data yang pada awalnya dilakukan secara manual untuk memanfaatkan komputersasi sebagai sarana pengelolaan administrasi keuangan. Sistem informasi yang cukup penting dalam sebuah instansi pemerintah adalah sistem informasi akuntansi. Hal ini menjadi bukti bahwa sistem informasi telah memasuki segala bentuk kegiatan

manajemen keuangan, yaitu penggunaan sistem informasi akuntansi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas. Informasi ini berguna bagi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi. Sistem informasi akuntansi menurut Marshall B. Romney (2019) adalah prosedur untuk menghimpun, mencatat, mengolah, dan menjaga data akuntansi beserta data lainnya untuk memberikan informasi bagi pengambil keputusan. Tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah agar dapat menyusun pelaporan keuangan yang akurat. Laporan keuangan mencakup rincian tentang aset, kewajiban, dan kekayaan bersih agensi sehubungan dengan situasi keuangannya. Astuti (2019) menegaskan bahwa data dalam laporan keuangan suatu lembaga dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat pertumbuhan suatu lembaga dan memberikan gambaran umum tentang situasi keuangannya.

Untuk menunjang pemanfaatan sistem informasi akuntansi dengan maksimal, instansi pemerintah juga menyerukan untuk memanfaatkan sistem pengendalian internal guna mendukung secara menyeluruh dari sisi susunan organisasi. Jika ingin berhasil menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan memiliki akuntabilitas yang baik dan sudah seharusnya seorang pimpinan melakukan pengendalian atas penyelenggaraan aktivitas instansi tidak terkecuali dalam penyusunan laporan keuangan. Pemerintah daerah di Indonesia tentu memiliki rencana kerja yang telah disusun dan disetujui oleh pimpinan daerah yang selanjutnya adalah ditetapkannya Anggaran Belanja dan Pendapatan

Daerah (APBD) guna mendukung realisasi pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Terdapat total akumulasi 90 OPD (Organisasi Pemerintah Daerah), Kecamatan dan Kelurahan pada Kabupaten Lumajang yang mengaplikasikan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) termasuk Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang. Terdapat tidak adanya sinkron data pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang antara menggunakan SIPKD dan SIPD karena kedua aplikasi tersebut memiliki peruntukan yang jauh berbeda. Lalu untuk penggunaan SIPD pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang masih dilakukan secara bertahap, karena sering terjadi kendala teknis baik dari pusat maupun perangkat yang digunakan sehingga dapat mengganggu pemanfaatannya secara maksimal. Adanya beberapa faktor yang mampu mempengaruhi minimnya sinkronisasi data keuangan antara perencanaan dan pengelolaan, menyebabkan melemahnya kualitas laporan keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang.

Tabel 1.1 Perbedaan SIPKD dan SIPD

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
<ul style="list-style-type: none"> • Diperuntukan untuk pengelolaan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Diperuntukan untuk perencanaan keuangan
<p>Contoh: Akun Biaya Perjalanan Dinas</p>	<p>Contoh: Akun Biaya Perjalanan Dinas</p>
<p>Terdapat pada SIPKD akun tersebut di input dengan rinci seperti berapa kali realisasi perjalanan dinas dilakukan, tujuan perjalanan dinas kemana dipaparkan dengan jelas. Dasar penginputan ini berasal dari dokumen atau data yang dihasilkan oleh SIPD.</p>	<p>Terdapat pada SIPD akun ini di <i>entry</i> berisikan besaran standar harga yang digunakan, aktivitas yang diperuntukan, serta kisaran waktu realisasinya. Karena bersifat perencanaan, maka inputan data pada aplikasi ini bersifat menentukan laju pengelolaan keuangan akan bergerak ke arah mana.</p>

-
- SIPKD dimanfaatkan untuk mengelola keuangan
 - SIPD dirancang untuk memberikan cakupan yang transparan dan komprehensif dari semua fase anggaran pemerintah daerah, termasuk perencanaan, penganggaran, implementasi, dan administrasi.
-

Contoh:

SIPKD memiliki kemampuan bisa menciptakan laporan – laporan keuangan secara tersistem. Laporan keuangan yang dimaksud seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan lain sebagainya. Laporan yang dihasilkan bersifat bukti dukung atas terjadinya transaksi keuangan yang telah dilakukan

Contoh:

Data yang terekam pada SIPD dapat dicetak sebagai Rekap Rincian Anggaran Belanja OPD, Rekap Pagu Anggaran Belanja OPD, dan yang paling utama yaitu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Dengan adanya dokumen – dokumen tersebut, barulah suatu OPD dapat melakukan transaksi belanja sesuai dengan peruntukan kegiatan dan besaran anggaran yang telah direncanakan pada SIPD

Sumber : Data Bagian Keuangan dan Bagian Penyusunan Program mengenai SIPKD dan SIPD, 2024

Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang memiliki 1 sekretariat dan 3 bidang diantaranya bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, bidang hubungan industrial dan jamsostek, serta bidang pelatihan tenaga kerja dan produktivitas. Dengan adanya beberapa bidang pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang proses pelaporan keuangan dilakukan oleh masing – masing bidang namun nantinya muara terakhir ada pada bagian keuangan sebagai tugas dan fungsi yang telah melekat pada bagian keuangan.

Sangat menarik untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Penelitian Ni Luh Wayan Tiya Lestari dan Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi (2020) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, dan pemahaman akuntansi semuanya berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Fenomena

yang sama juga terjadi pada penelitian Meike Abas dkk. yang menemukan bahwa kinerja karyawan dan keahlian akuntansi berdampak besar terhadap akurasi akun keuangan (2023). Karakteristik laporan keuangan, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kinerja pegawai yang baik sangat penting di instansi mana pun karena semuanya berkontribusi terhadap keberhasilan penyelesaian tugas yang diberikan.

Jika benar dikatakan bahwa data keuangan di kedua aplikasi yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang tidak sinkron, maka pertanyaan tentang bagaimana sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, dan kinerja karyawan semuanya dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan akan muncul. Informasi latar belakang ini menjadi dasar analisis kajian terhadap pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan kinerja pegawai terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini berfokus pada ilmu Akuntansi
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Kinerja Pegawai. Sedangkan variabel dependen menggunakan Karakteristik Laporan Keuangan.

3. Instansi pemerintahan yang dijadikan obyek penelitian adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijelaskan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Karakteristik Laporan Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Karakteristik Laporan Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang?
3. Apakah Kinerja Pegawai berpengaruh terhadap Karakteristik Laporan Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Karakteristik Laporan Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Karakteristik Laporan Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kinerja Pegawai terhadap Karakteristik Laporan Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mendukung optimalisasi pengetahuan dan referensi peneliti melalui penelitian dengan judul pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan kinerja pegawai terhadap karakteristik laporan keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang

2. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan referensi tambahan bagi pembaca mengenai topik atau variable yang serupa

3. Bagi instansi

Bagi pihak instansi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang, diharapkan dapat menjadi masukan objektif yang membangun dan informasi tambahan guna dapat meningkatkan penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan kinerja pegawai terhadap karakteristik laporan keuangan